



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 14 Desember 2023

Nomor : 100.3.1.2 / 14950/SET
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tahun 2024.

Kepada
Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

di -

JAYAPURA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Papua mengajukan Propemperda Provinsi Papua Tahun 2024, untuk dibahas dan disepakati bersama dan ditetapkan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (daftar Propemperda terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pj. GUBERNUR PAPUA,

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRP di Jayapura.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK			STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				5			BARU	UBAH			
			4				6	7	8	9	10
1	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.	RAPERDASI	Kepemudaan.	- Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah. - Peran, Tanggungjawab dan Hak Pemuda. - Perencanaan Kepemudaan. - Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2024	
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.	RAPERDASI	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Papua.	- Wewenang Di Bidang Kepariwisata. - Persyaratan, Permodalan dan Perizinan. - Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat. - Hak, Kewajiban dan Peran Serta Pengusaha Pariwisata. - Jenis Pariwisata. - Konsep Pembangunan Pariwisata. - Rencana Pengembangan Kawasan Wisata.			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2024	
3	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	RAPERDASUS	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	- Kewenangan - Wilayah Pertambangan - Wilayah Usaha Pertambangan - Wilayah Izin Usaha Pertambangan - Usaha Pertambangan			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2024	
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Pedoman Mekanisme Kepemilikan Saham Lembaga Mikro Terkait Dengan Kewajiban Kepemilikan Saham Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pembiayaan	- Mekanisme Kepemilikan Saham - Kewajiban Kepemilikan Saham - Akses Pembiayaan			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	
5	BPKAD Provinsi Papua	RAPERDASUS	Dana Abadi	- Pembentukan Dana Abadi - Pengelola Dana Abadi Daerah - Penerima Manfaat - Akuntabilitas Dan Pengawasan			Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.	RAPERDASUS	Usaha-Usaha Perekonomian Di Provinsi Papua Yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dilakukan Dengan Tetap Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat, Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pengusaha Serta Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Pengaturannya.	- Bentuk Usaha Perekonomian - Manfaat Perekonomian Bagi Masyarakat Hukum Adat - Penghormatan Terhadap Pemilik Hak Ulayat - Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	
7	Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua.	RAPERDASI	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi.	- Perencanaan Dan Penetapan - Pengembangan - Pemanfaatan - Pembinaan - Pengendalian	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.	RAPERDASI	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Tahun 2023 - 2043.	- Sistematika Rencana Pembangunan Industri Papua - Kewenangan Pemerintah Daerah - Industri Unggulan Provinsi - Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri - Rencana Pembangunan Industri Papua 2023-2043 - Kaidah Pelaksanaan - Sumber Daya Manusia Industri - Pembinaan Dan Pengawasan	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.	RAPERDASI	Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Daerah Di Bidang Ketertiban Dan Ketenteraman.	- Tugas Dan Wewenang - Kewajiban Pemerintah Daerah - Penanganan Ketertiban Dan Ketenteraman - Pengawasan - Evaluasi - Ketentuan Lain-Lain - Pembiayaan - Ketentuan Penutup	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI FOKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Biro Tata Pemerintahan dan OTSUS SETDA Provinsi Papua	RAPERDASI	Kewenangan pemerintah Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.	- Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan - Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota - Penagihan Aset - Penyelenggaraan Urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua - Supervisi, Pengawasan dan Evaluasi	-	Ubah	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	2024	
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.	RAPERDASI	Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.	- Maksud Dan Tujuan - Asas Dan Ruang Lingkup - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak Dan Gas Bumi - Pembinaan Dan Sosialisasi - Penyidikan - Ketentuan Penutup	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.	RAPERDASI	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Tahun 2023-2050.	- Maksud Dan Tujuan - Periode Penyusunan Dan Sistematisasi RUED-P - Sumber Energi - Kelembagaan - Kerjasama - Peran Serta Masyarakat - Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi - Lingkungan Dan Keselamatan	Baru	-	- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	2024	

Pj. GUBERNUR PAPUA,

Dr. M. RIDWAN ROMASUKUN, SE., MM